**Application of Community Based Tourism (CBT) in Tourism Development Efforts in Tangkahan Langkat Regency.**

# Nurhafizhah Khairi1

**1Politeknik Pariwisata Medan**

***Correspondence* : Nurhafizhah Khairi, Politeknik Pariwisata Medan**

# *Email* : <fizhakhairi01@gmail.com>

# DOI : <https://doi.org/10.36983/thcij.v2i2.376>

***ABSTRACT***

*Tangkahan is a tourist attraction that moves on the potential of ecotourism with good community involvement. The concept of CBT (Community Based Tourism) is applied to realize the management of tourism by involving local communities, forming institutional tangkahan tourist attraction and community business groups. Stakeholders involved in the management of tourist attractions consist of community groups, government and private organizations that have their respective roles in realizing tangkahan Tourism Development. This study uses qualitative research that uses a community-based research model as a community effort to provide support, strength, resources, and participation in the research process to create informative research products. Data sources in this study are primary and secondary data sources with observation data collection techniques, interviews and documentation, data analysis using data collection stages, data condensation, data presentation and conclusion. The results showed that tangkahan tourism development comes from the initiative of local communities who have a common understanding that the village has a growing tourism potential. The creation of the tangkahan ecowosata development program and the emergence of community businesses as a form of tangkahan tourism development results. Based on the findings of researchers Tangkahan Tourism Institute managed to build community kelolmpok coordinated in writing and cooperate with the private sector and the Institute of Mount Lauser National Park with the same synergy to keep and menjadikawan Tangkahan area awake and attract more tourists.*

***Keywords: tourism, Community Based Tourism (CBT), community***

**Penerapan *Community Based Tourism* (CBT) Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata di Tangkahan Kabupaten Langkat.**

# ABSTRAK

Tangkahan merupakan Objek Wisata yang bergerak pada potensi ekowisata dengan keterlibatan masyarakat yang cukup baik. Konsep CBT (Community Based Tourism) yang di terapkan untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal, membentuk kelembagaan objek wisata tangkahan dan kelompok usaha masyarakat. Pemangku kepentingan terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata terdiri dari kelompok masyarakat, pemerintah dan organisasi swasta yang memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan pengembangan pariwisata tangkahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan model penelitian berbasis masyarakat sebagai upaya masyarakat untuk memberikan dukungan, kekuatan, sumber daya, dan partisispasi dalam proses penelitian untuk menciptakan produk penelitian yang informatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, kpondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tangkahan berasal dari inisiatif masyarakat setempat yang memiliki kesamaan pemahaman bahwa desanya memiliki potrensi wisata yang berkembang. Terciptanya program pengembangan ekowosata tangkahan dan munculnya usaha masyarakat sebagai bentuk hasil pengembangan pariwisata tangkahan. Berdasarkan temuan peneliti Lembaga Pariwisata Tangkahan berhasil membangun kelolmpok masyarakat yang berkordinasi secara tertulis dan melakukan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga Taman nasioanal gunung Lauser dengan sama-sama bersinergi menjaga dan menjadikawan kawasan tangkahan terjaga dan menarik lebih banyak wisatawan.

## Kata kunci: Pariwisata, Community Based Tourism (CBT), Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terkenal di bidang pariwisata. Dari Sabang sampai Merauke, keindahan alam Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama dan bahasanya mampu memikat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Bagian yang berbeda dari kota dan daerah pedesaan mulai bersaing satu sama lain untuk membuat perbedaan. Konsep yang muncul adalah paradigma pertumbuhan, sebuah gagasan yang berjuang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Destinasi pariwisata sebagai tempat hidup masyarakat untuk bekerja serta melakukan kegiatan sosial dan budaya. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu destinasi pariwisata, sehingga dalam pengembangan destinasi pariwisata wajib mempertimbangkan berbagai elemen masyarakat (Adikampana:2017). Dogra dan Gupta menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata. Oleh karena itu, keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung dari tingkat keterlibatan masyarakatnya dalam pembangunan destinasi pariwisata (Adikampanan: 2017)

Komunitas wisata yang disebut masyarakat lokal memiliki potensi berupa berbagai kegiatan yang dapat dialihfungsikan menjadi produk wisata. Budaya lokal, warisan lokal dan festival menawarkan sesuatu yang unik dan baru dari perspektif pariwisata. Masyarakat yang memiliki kearifan dan pedoman lokal akan lebih memahami produk wisata yang sedang dikembangkan dan implikasinya dibandingkan dengan masyarakat di luar kawasan wisata.Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata, karena masyarakat lokal adalah komponen utama pembentuk citra atau image destinasi pariwisata (Pike, 2004).

Begitu pentingnya peran masyarakat dalam Pengembangan destinasi wisata dalam Mempromosikan budaya lokal sehingga munculnya tren baru dalam pengembangan pariwisata Berdasarkan komunitas. Program pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata di tingkat lokal, Tingkat regional dan nasional. Konsep yang menggambarkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah Community Based Tourism (CBT).

Konsep Community Bases Tourism (CBT) telah di terapkan di kabupaten Langkat khususnya di objek wisata Tangkahan yang telah terbentuk komunitas masyarakat secara formal yang terbentuk secara resmi oleh pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan yang disebut dengan lembaga pariwisata tangkahan. Dasar awal pembentukan lembaga tersebut untuk melindungi Taman Nasional Gunung Lauser seluas 5700 Hektar. Tangkahan memanfaatkan taman nasional gunung lauser sebagai daya tarik wisata dengan melibatkan masyarakat langsung sebagai pelaku penggiat wisata sejak tahun 2001 dibentuk lembaga pariwisata tangkahan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, mahasiswa dan pemerintah. Terbentuknya lembaga pariwisata tangkahan mulai munculnya paket – paket wisata yang mereka bentuk pada awalnya mandi gajah dan  tracking kegunung lauser dengan gajah pada tahun 2014. Lembaga pariwisata tangkahan diperuntukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, membuka lapangan kerja dan membuka usaha fasilitas pariwisata. Selain melibatkan masyarakat lokal lembaga pariwisata tangkahan juga bekerja sama dengan Lembaga taman nasional gunung lauser (TNGL) dan Conservation Response Unit (CRU).

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis peran dan program kerja komunitas serta keterlibatkan masyarakat secara luas dalam pengembangan pariwisata tangakahan, maka hal itu peneliti mengangkat topik “Penerapan Community Based Tourism dalam pengembangan pariwisata tangkahan”.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pariwisata**

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. (suwena dan Widyatmaja:2017). Menurut Jordan (dalam Suwena dan Widyatmaja:2017) bahwa sistem pariwisata adalah tatanan komponen dalam industri pariwisata di mana masing-masing komponen saling berhubungan dan membentuk sesuatu yang bersifat menyeluruh.

Pertumbuhan pariwisata sebagai industri belakangan ini menunjukkan grafik yang sangat meningkat dan bahkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Isdarmanto:2017).

**Pengembangan pariwisata**

Sulistyadi, dkk (16:2017) menjelaskan bahwa Konsep pariwisata pada awalnya banyak dikembangkan oleh para ahli biokonservasi, dimana mereka melihat perkembangan wisata alam, yang cukup besar di era tahun 80-an yang memperlihatkan dampak negatif yang cukup serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati, jika tidak dibarengi upayya pelestarian di satu pemangku. Pandangan lain menyebutkan bahwa pariwisata yang bersifat multisektoral, merupakan wadah yang memberikan kesempatan sangat besar untuk mendorong usaha pelesatarian ketingkat global. Sementara disisi lain sebagian besar para ahli bio-observasi melihat bawah pendekatan berbasis masyarakat merupakan salah satu solusi.

Sulistyadi, dkk (16:2017) juga menjelaskan konsep pariwisata terdiri dari pelestarian lingkungan (Alam, Budaya), peningkatan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, telah diperkenalkan dan dikembangkan dan dikembangkan dengan sukses dinegara berkembang. Pengembangan ini selalu konsisten dengan dua prinsip dasar yaitu memberi keuntungan ekonomi langsung kepada masyarakat lokal serta turut andil dalam pelestarian alam.

Kosisten pengembangan memerlukan kerjasama diantara para pemangku kepentingan agar praktek yang bertanggung jawab dapat berjalan dan indikator kunci yang strategis dapat terpantau yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, oleh pemerintah daerah dan juga oleh seluruh pihak – pihak yang berkepentinagn (sulistyadi, dkk (16:2017)

**Community Based Tourism (CBT)**

Adimihardja (1999) dalam rizkianto (2017) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan power (daya) atau empowering dari golongan masyarakat yang powerless (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

Berikut gambar ilustrasi pemangku kepentingan dalam pariwisata Sunaryo (dalam Rizkianto:2017)

Gambar 2.1 Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata

*Sumber: Sunaryo dalam Rizkianto (2017)*

Jabaran peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan;
2. Kalangan Swasta (pelaku usaha/ industri pariwisata) dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan;
3. Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (host), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Peran masyarakat dapat disimpulkan dari gambar di atas Sangat besar dan diperlukan untuk implementasi pariwisata Ada keseimbangan antara peran pemerintah dan sektor swasta.

Bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan Comunnity Based Tourism (CBT) sebagai pendekatan pembangunan. Nicole Hausler (2003), mengemukakan gagasan tentang definisi dari Community Based Tourism (CBT) yaitu:

1. Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat loka untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata.
2. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan.
3. Menuntut pemberdayaan secara politisi dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada communitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Terdapat beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan Suansri (2003:12) dalam gagasannya yaitu:

1. Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
2. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai semua aspek
3. Mengembangkan kebanggan komunitas
4. Mengembangkan kualitas hidup komunitas
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan
6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal
7. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas
8. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
9. Mendistribusukan keuntungan secara adil pada anggota komunitas
10. Berperan dalam menentukan persentase pendapat (pendistribusian pendapat) dalam proyek yang ada di komunitas

Suansari (2003: 21-23) menyampaikan point-point yang merupakan aspek utama pengembangan CBT berupa 5 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi, dengan Indokator:
2. Adanya dana untuk pengembangan kmunitas
3. Terciptanya lapangan pekerjaa di sektor pariwisata
4. Timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata
5. Dimensi Sosial, dengan Indikator:
6. Meningkatankan kualitas hidup
7. Peningkatan kebanggan komunitas
8. Pembagian peran yang adil antara laki-laki, perempuan, generasi muda dan tua
9. Membangun penguat organisasi komunitas
10. Dimensi Budaya, dengan Indikator
11. Mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda
12. Membantu berkembangnya pertukaran budaya
13. Budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal
14. Dimensi Lingkungan, dengan Indikator:
15. Mempelajari carrying capacity area
16. Mengaturpembuangan sampah
17. Meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi
18. Dimensi Politik, dengan Indikator:
19. Meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal
20. Peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas
21. Menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA

Menurut Prayogo dalam mulyadi (2009) menyebutkan dalam pengembangan pariwisata, partisipasi masyarakatdibedaka menjadi dua jenis, yaitu:

1. Partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat secara sadar yang memang diarahkan untuk mengambangkan pariwisata , meliputi pembangunan secara gotong royong, peningkatan dalam pengusaha pariwisata atau dengan melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat oleh pemerintah
2. Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang dilakukan secara tidak langsung bersentuhan dengan kegiatan pariwisata. Masyarakat secara individu tidak langsung tidak langsung mendapatkan kontribusi dari kegiata pariwisata meliputi pemeliharaan kebersihan lingkungan, pembinaan seni budaya yang bermutu, pembinaan keindahan dan pembinaan kepribadian.

Hal senada juga dijelaskan oleh Garrod et al., 2001 Timothy dan Boyd, 2003, bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Partisipasi pengambilan keputusan,
2. Partisipasi pembagian manfaat pariwisata

Korten dalam Aliya,dkk (2020) menyatakan bahwa dari sektor pariwisata, model pembangunan bottom up palnning, sejalan dnegan paradigma pariwisata yang bercirikan kerakyatan, resource community based management atau community manageme nt. Paradigama pariwisata kerakyatan dalam berbagai bentuk telah lama menjadi paradigma alternatif sebagai kegagalan model modernisasi yang diterapkan di negara – negara berkembang termasuk indonesia yang memiliki banyak kelemahan karena selalu mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kurang memperhatikan masalah sosial budaya masyarakat. Terkait dengan pemikiran tersebut, maka desa – desa yang memiliki keunikan mulai dilirik untuk disiapkan menjadi desa wisata maupun wisata perdesaan oleh pemerintah maupun pelaku-pelaku wisata (Aliya,dkk: 2020)

Menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo (2013:139) pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu pasrtisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu 51 pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisatan yang berbasis pada masyarakat atau community based tourism, yaitu:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Pendidikan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal (Sunaryo: 2013)

Suansri (2003:21-22) mengembangkan 5 prinsip yang merupakan aspek utama dalam pengembangan Community Based Tourism (CBT), yaitu:

1. prinsip ekonomi dengan indikator timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal.
2. Prinsip sosial dengan indikator terdapat peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara lakilaki perempuan, generasi muda dan tua dan terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas.
3. Ketiga, prinsip budaya dengan indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal.
4. Keempat, prinsip lingkungan dengan indikator pengembangan carryng capacity area, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan adanya keperdulian tentang pentingnya konservasi. Kelima, prinsip politik dengan indikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih 52 luas dan terdapat makanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kelima prinsip tersebut menurut Suansri merupakan wujud terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan.

Suansri (2003) menyebutkan beberapa prinsip dari Comunity-Based Tourism yang harus dilakukan, yaitu:

1. mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata;
2. Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya,
3. Mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan;
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan;
6. Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal;
7. Mengembangkan pembelajaran lintas budaya;
8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia;
9. Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsioanal kepada anggota masyarakat;
10. Memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat; dan
11. Menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Pariwisata berbasis masyarakat Dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara pemangku kepentingan pengembangan pariwisata, termasuk pemerintah, Swasta dan masyarakat. Idealnya, prinsip-prinsip pengembangan pariwisata Fokus berbasis masyarakat pada pengembangan pariwisata dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat.

## METODOLOGI

metode penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Dalam hal ini, penulis menjelaskan masalah yang Ditemukan dengan jelas dan akurat apa adanya. Seperti yang dijelaskan Irawan Soeharto (2008) Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Proses analisis data dimulai dengan memvalidasi informasi atau data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau studi dalam dokumen. Semua data yang diperoleh dirangkum, diklasifikasikan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian dikontruksikan dengan Pendekatan kualitatif ke pendekatan deskriptif untuk analisis selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan instrumen data

Sebelum untuk melakukan penelitian ke lapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk memudahkan pengumpulan data.

1. Pengumpulan data Selama penelitian di lapangan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan Komunitas Pariwisata Tangkahan serta mengetahui jumlah anggota yang terdapat di Lembaga untuk pendataan.
2. Klasifikasi data Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian di kelompokan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Gambaran Umum Tangkahan

Kecamatan Tangkahan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Batan Serangan. Kabupaten Langat, Sumatera Utara. Ditentukan daerah Tangkahan sebagai Kawasan ekosistem Lauser dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, Taman Nasional Gunung Lauser di dua desa, Desa Namo sialang dan Desa Sei Serdang. Tangkahan merupakan daerah kecil yang berada di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan Tangkahan berada di perbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser. kawasan Tangkahan terletak di pertemuan dua sungai yaitu Sungai Buluh dan sungai Batang Serangan. Masih memiliki bentuk batuan yang alami dan memiliki alam yang indah, dan juga masih memiliki sumber mata air terjun, air panas, tebing, keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Secara geografis Tangkahan berada pada LU 300 41’ 01”, BT 980 4’26,8”. Pada umumnya Kabupaten Langkat berada pada ketinggian di bawah 130-200 meter di atas permukaan laut. Tangkahan sendiri sendiri merupakan objek wisata yang berbasih ekowisata.

Wilayah – wilayah yang membatasi kawasaan Tangkahan secara geografis dapat disebut sebagai berikut:

* Sebelah Timur : Desa Kuala Buluh
* Sebelah Selatan : Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Garuda Permana
* Sebelah Barat : Taman Nasional Gunung Lauser
* Sebelah Utara : Perkebunan Kelapa Sawit Milik PTPN II

Kawasan Pariwisata Tangkahan mempunyai keanekaragaman tumbuhan & hewan yg bisa pada jadikan sebagai daya tarik wisata. Misalnya pohon kayu jenis damar, meranti, & cendana, hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dikawasan Tangkahan mempunyai spesies primate, misalnya Orangutan Sumatera, Siamang, Beruk & Monyet ekor panjang. Adapun hewan yg lain yg bisa dipandang pada daerah ekowisata Tangkahan merupakan Tupai kecil, Burung Rangkong, Srigunting Batu, & Elang.

Selain kekayaan tanaman & hewan tempat Tangkahan pula mempunyai wisata petualang, antara lain jelajah hutan, yg sekaligus bisa belajar mengenai tanaman & hewan hutan hujan sembari berjalan-jalan pada hutan, mendaki gunung, menyebrangi sungai & menemui ke ajaiban alam pada hutan hujan. Berkema, menelusuri gua, trekking gajah, tubing dn lainya.

**Penduduk**

Penduduk dari berbagai suku bangsa tinggal di dalam dan sekitar wilayah Tangkahan. Orang karo adalah mayoritas penduduk yang tinggal di desa-desa sekitarnya Bukit Lawang ditambah dengan Jawa, Batak dan Melayu yang hidup sebagai pekerja Perkebunan kelapa sawit dan karet.

Desa Namo Sialang berpenduduk 5037 jiwa, 2477 di antaranya adalah laki-laki. Dan 2560 wanita. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah buruh perkebunan, pegawai negeri sipil, dan ada pula yang bergerak di bidang pertanian, peternakan dan pertanian. penangkapan ikan.

Desa Sei Serdang mempunyai jumlah penduduk 3120 jiwa yg terdiri menurut 1531 pria & 1589 perempuan. Hampir sama dengan penduduk pada desa Namo Sialang, mata pencaharian penduduk Desa Sei Serdang merupakan pekerja perkebunan (baik kebun milik eksklusif juga milik swasta, berupa kebun jeruk manis, kebun karet atau pun kelapa sawit) dan pegawai.

Kegiatan kehidupan masyarakat di kedua desa tersebut sangat kondusif. mengikat kekerabatan merupakan mata rantai kehidupan sosial yang tidak terputus di wilayah Tangkahan da Lingkungan sekitar. Demikian pula kehidupan beragama terasa sangat toleran antar umat Islam, Katolik dan Protestan juga mendorong orang untuk saling membantu dan melakukan sesuatu.

**Perkembangan Sektor Pariwisata Tangkahan**

Dalam melaksanakan pengembangan sektor pariwisata, Langkat memiliki banyak peluang dan tantangan, mengingat memiliki potensi yang lebih besar karena banyaknya diferensiasi produk. namun beberapa kawasan wisata alam Kabupaten Langkat terkonsentrasi pada pengembangan. Hanya akan diadakan di kawasan wisata Bukit Lawang. Di sisi lain, potensi objek dan daya tarik yang terdapat di Kawasan Wisata Alam Tankahan jauh lebih baik. Kawasan Wisata Alam Tankahan memiliki pendukung dan pengekang yang menjelaskan potensi Kawasan Wisata Alam Tankahan dan menunjukkan apakah Kawasan Wisata Alam Tankahan dapat dikembangkan.

Kawasan Pariwisata Tangkahan memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang menggambarkan potensi yang dimiliki kawasan wisata Tangkahan dan menunjukkan apakah kawasan Pariwisata Tangkahan layak untuk di kembangkan, dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut sebagai berikut.

1. Kekuatan
2. Kawasan Pariwisata Tangkahan yaitu objek wisata alam yg mempunyai daya tarik yg tinggi lantaran estetika alamnya misalnya pegunungan, sungai & hutannya. Kemudian adanya karakteristik spesifik yg bersifat langka yg nir dimiliki daerah wisata alam lainya yg terdapat pada Kabupaten Langkat khususnya, misalnya: Air terjun sungai buluh, air panah sungai buluh, air terjun sungai garut, ait terjun tala-tala.
3. Bentuk kegiatan wisata yang ditawarkan adalah: Rekreasi keluarga, wisata air (berenang, memancing, tubing) menikmati pemandangan sungai dan alam sekitar, berkemah, penjelajahan hutan, bersepeda, dan pengamatan satwa.
4. Masyarakat di sekitara kawasaan pariwisata tangkahan yg sudah dibuat sebagai lembaga pariwisata tangkahan menjadi pengelolaan dan pengembangan tempat Pariwisata Tangkahan. Lembaga pariwisata Tangkahan yang selalu menaruh layanan yang baik pada para wisatawan yang tiba ke Pariwisata Tangkahan.
5. Kelemahan

Pengembangan Kawasan Pariwisata Tangkahan, sarana dan prasarana wisata juga menjadi faktor pendukung untuk menarik wisatawan ke kawasan wisata, dan kawasan wisata tangkahan memiliki kelemahan.

1. Belum baiknya prasarana jalan dan petunjuk jalan yang akan mendukung kenyamana wisatawan yang akan berkunjung ke Tangkahan.
2. Kemudian fasilitas wisata Tangkahan kurang baik, seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan fasilitas wisata lainnya yang menunjang kenyamanan wisatawan.
3. Setelah itu belum adanya loket-loket pelayanan misalnya sentra perbelanjaan, loket pelayanan kesehatan, pom bensin, bank & lain-lain yg bisa pada ambil manfaatnya untuk menaikkan arus informasi, arus kemudian lintas ekonomi dan arus gerak insan antar wilayah yg tentu saja bisa menaikkan kesempatan berusaha dan bekerja rakyat sekitar.
4. Peluang
5. Jumlah kunjungan para wisatawan yang terus semakin tinggi berdasarkan tahun ke tahun baik wisatawan lokal juga wisatawan mancanegara, ini menampakan bahwa tempat Pariwisata Tangkahan sebagai wilayah tujuan wisata pada Kabupaten Langkat, sangat diharapkan bisa menjadi pendapatan dalam PAD pada Kabupaten Langkat.
6. Pariwisata Tangkahan tidak hanya menarik wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara yang sudah mengetahui keberadaan destinasi wisata Tangkahan melalui promosi yang dilakukan oleh Lembaga Pariwisata Tanhkahan dan Dinas Pariwisata Provinsi Langat.
7. Pola kemitraan yang dikembangkan di Tangkahan adalah sebagai perwakilan masyarakat yaitu lebaga pariwisata tangkahan untuk di bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:
8. Taman Nasional Gunung Lauser, kerjasama yang dilakukan adalah tenang zonasi Taman Nasional Gunung Lauser yang diizinkan dan di manfaatkan sebagai kawasan wisata.
9. *Travel agent*, kerjasama dalam menyediakan paket – paket wisata dan jasa *quied* serta *rangers* bagi calon wisatawan*.*
10. Pihak Swasta seperti pengusahaan jasa akomodasi di Tangkahan, kerja sama dalam hal pemberian donasi bagi lembaga pariwisata tangkahan dan pelestarian lingkungan wisata Tangkahan.
11. Ancaman
12. Masuknya budaya asing yang tidak mengikuti budaya lokal, dimana budaya lokal terlempar ke belakang sistem industri yang menggunakan teknologi Barat.
13. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara akan menurunkan kualitas lingkungan sekitar destinasi wisata seperti polusi yang akan mengancam wisata alam Tankahan.

**Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) dalam Pengembangan pariwisata Tangkahan**

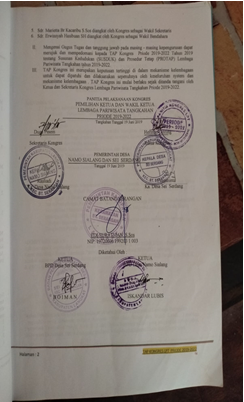
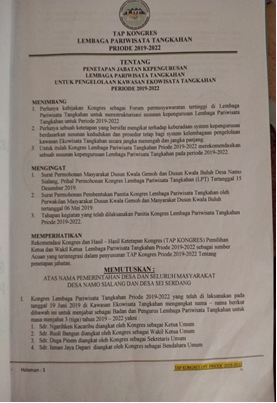
Dalam pengembangan kawasaan pariwisata tanggkahan masyarakat melakukan pengembangan dengan menggunakan konsep *Community Based Tourism.* CBT merupakan pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat yang melibatkan peran masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan. Sehingga manfaat dari kegiatan pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. CBT juga menekan kepada pemberdayaan masyarakat untuk menjadi lebih memahami nilai dan aset yang mereka miliki seperti kebudayaan, adat istiadat, kuliner, gaya hidup dan potensi alam.

**Pembentukan Lembaga Pariwisata Tangkahan**

Lembaga Pariwisata tangkahan yang dibentuk pada 20 April 2001 adalah sebuah lembaga masyarakat lokal yang terbentuk dari hasil perdes bersama masyarakat desa Namo Sialang dan Masyarakat Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan. Lembaga pariwisata tangkahan merupakan bentuk dari kesadaran masyarakat untuk menghasilkan kegiatan yang bermanfaat sebagaii salah satu solusi alternatif seperti yang diketahui pada sebelum tahun 2000 terjadi perburuan dan penebangan kayu secara liar di kawasan Tangkahan dan Taman Nasional Gunung Lauser. Selain itu lembaga pariwisata tangkahan bertujuan untuk merencanakan dan mengelola kawasan Tangkahan sebagai objek Ekowisata.

Dimulai pada tahun 2001 peran lembaga pariwisata tangkahan dalam upaya pengembangan pariwisata tangkahan sebagai ekowisata disamping upaya konservasi. Pendirian lembaga pariwisata tangkahan didirikan melalui kongres yang dilakukan setiap tiga tahun sekali dan di hadiri oleh aparatur desa dan masyarakat. kemudian membentuk beberapa devisi untuk operasional kegiatan, sesuai yang jelaskan bagian operasional Bang Suka.

**Gambar 1.** **Tap Kongres Lembaga Pariwisata Tangkahan**



*Sumber: Lembaga Pariwisat*

Pada gambar dijelaskan bahwa pada kongres terakhir pada Lembaga Pariwisata Tangkahan Periode tahun 2019 – 2022 dipimpin oleh Bapak Ngariken Kacaribu sebagai Ketua Umum, Bapak Rusli Bangun sebagai wakil ketua umum, Bapak Duga Pinem sebagai skretaris umum dan Bapak Isman Jaya Depari diangkat sebagai Bendahara umum, Ibu Marietta Br. Kacaribu sebagai Wakil skretaris dan Bapak Erwinsyah Hasibuan SH sebagi wakil bendahara. Kemudian ada beberapa koordinator departemen dibawah pimpinan terkait yaitu Ranger, operasional, Seni Budaya, riset dan BUML ( Badan Usaha Milik Lembaga).

Selain membentuk beberapa devisi untuk operasional kegiatan, Lembaga juga membangun skretariat yang salah satu fungsinya untuk mendokumentasikan kegiatan yang pernah dilakukan terkait dengan kegiatan wisatawan maupun operasional di tangkahan. Selain itu LPT juga melatih anggotanya sebagai pemandu wisata (Ranger) maupun tim penyelamat (SAR) yang membantu dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas ekowisata. Selain bergerak dalam pengembangan keanggotaan, Lembaga pariwisata juga memperhatikan generasi penerus dengan menghadirkan kursus bahasa inggris gratis yang diikuti oleh anak-anak sekitar tangkahan. Untuk kelancaran operasioaal lembaga pariwisata tangkahan melakukan kemitraan dengan LSM lokal maupun international, selain itu juga mengikut sertakan keangotaan dalam berbagai kegiatan seminar.

Pada tahun 2006 Lembaga Pariwisata Tangkahan pernah melakukan kerjasama dengan INDECON dengan mengadakan pelatihan kepada masayarakat tentang pembuatan kerajinan/soevenir sebagai cara dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan sadarnya akan perkembangan pariwisata tangkahan, Lembaga Pariwisata Tangkahan membangun Koprasi bernama Namo tangkahan pada tahun 2019, koprasi didirikan untuk mengurus Guide karena ada enam bidang yang akan dilegalkan dalam melayani tamu. Gerakan pembentukan lembaga pariwisata Tangkahan diharapakan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada, yakni di suatu sisi sebagai upaya pelestarian hutan dan Taman Nasioanl Gunung Lauser, dan disisi lain dalam rangka pemberdayaan dan penguatan sumber daya manusia yang ada di sekitar kawasan Tangkahan.

**Partisipasi Masyarakat Lokal**

Penggunaan konsep *Community Based Tourism* ini, pada awalnya telah dilaksanakan oleh masyarakat lokal desa Namo Sialang khususnya masyarakat Tangkahan untuk menggagas pariwisata Tangkahan. Sesuai dengan hasil wawancara, partisipasi yang pada awalnya digerakkan hanya oleh sekelompok masyarakat yang sadar akan penebangan hutan secara liar kemudian mendapatkan dukungan oleh masyarakat desa Namo Sialang dan Sei Serdang secara luas. Hal ini memunculkan kesadaran bersama bahwa keterlibatann seluruh komponen masyarakat dibutuhkan untuk membangun desanya menjadi kawasan pariwisata yang unggul.

Kesadaran yang telah dimiliki oleh masyarakat mendapat dukungan dari pemerintah Desa Namo Sialang dengan mengadakan kongres pembentukan Lembaga Pariwisata Tangkahan setiap 3 tahun sekali sebagai komando dalam pengelolaan pariwisata tangkahan. Selain pemerintahan desa Tangkahan juga mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten yang memberikan perhatian dalam perbaikan akses jalan menuju Tangkahanm dengan adanya MOU dengan politeknik pariwisata dengan kabupaten Langkat bersama – sama membangun pariwisata tangkahan.

Upaya bersama untuk membuka pariwisata tangkahan sejak tahun 1998 mulai menampakkan hasil dengan adanya wisatawan dari luar negeri. Atraksi Wisata Tubing di Sungai dengan di awali tracking di hutan dan melihat aktiftas Gajah yang sangat diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke Tangkahan. Setiap akhir pekan selalu ada wisatawan yang datang berkunjung.

Pada tahap peningkatan kapasitas, masyarakat Tangkahan dituntut untuk memiliki pengetahuan untuk kepariwisasataan dan memiliki keterampilan untuk mengelola daya tarik wisata yang ada selain itu masyarakat mulai tertarik untuk membangun usaha dibidang pariwisata seperti melakukan pembangunan hotel dan restauran dikawasan tangkahan. Masyarakat juga mulai percaya diri membangun pariwisata di Tangkahan dengan Mandiri dan bersinergi dengan Lembaga Pariwisata tangkahan dengan memberikan sumbangsih dana bantuan ke lembaga terkait penegmabngan pariwisata Tangkahan kedepannya.

Klasifikasi tahapan pemberdayaan dalam rangka melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 01 Klasifikasi tahap pemberdayaan masyarakat Desa Namo Sialang.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahapan Pemberdayaan | | |
| Penyedaran | Peningkatan Kapasitas | Pendayaan |
| 1. Ide dari Masyarakat dan membentuk kelompok 2. Aksi nyata saling bersinergi setiap lapisan masyarakat 3. Pemberian wawasan kepada masyarakat lain 4. Kesadaran seluruh masyarakat 5. Seluruh masyarakat mulai bergerak dalam pembaguanan fasilitas pariwisata | 1. Bermitra dengan Lembaga Masyarakt dan Pemerintah 2. Sosialisasi sadar Wisata 3. Pendampingan Rutin 4. Pelatihan dalam rangka skil dalam pengemabngan pariwisata 5. Berjaring dengan travel agent dan objek wisata sejenis lainnya. | 1. Pembenntukan Koprasi Lembaga Pariwisata Tangkahan 2. Memperjelas Tupoksi Antar pengurus 3. Pelibatan tokoh masyarakat sebagai mitra membantu pengelolaan 4. Evaluasi rutinan setiap satu bulan sekali. |

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2022)*

Partisipasi impulsif pula ditandai menggunakan rakyat terlibat menjadi penghasil keputusan yg dibuktikan pada pembentukan kelembagaan dan pengelolaan daya tarik wisata yg ada, semua komponen rakyat Tangkahan terlibat & punya kiprah masing-masing sesuai kapasitasnya. Dan pada partisipasi impulsif, rakyat menjadi perencana, pelaksana & evaluator. Dalam penerapannya pada lapangan, setiap perencanaan pada memilih arah pengelolaan daya tarik wisata selalu diadakan musyawarah beserta yg difasilitasi Pemerintah Desa Namo Sialang juga inisiatif rakyat sendiri melalui rencana rutinan setiap satu bulan sekali.

**Peran Pemerintah sebagai Fasilitator pengelolaan Pariwisata Tangkahan**

Pembangunan Pariwisata tidak bisa terlepas dari peran pemerintah, seperti yang diketahui pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang pasal 1 dan ayat 5, menyebutkan bahwa adanya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat ke masing masing wilayah otonom (provinsi & kabupaten/kota) diperlukan bisa berakibat wilayah otonom yang bersangkutan buat lebih maju, mandiri, sejahtera, & kompetitif pada pada aplikasi pemerintahan juga pembangunan wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai Penanggung jawab fokus pada destinasi Pariwisata Tangkahan dan selalu mengutamakan daerah yang memiliki potensi sebagai aset daerah. Mengingat destinasi Pariwisata Tangkahan merupakan destinasi wisata yang masih dalam pengembangan. Rencana diperlukan untuk membangun industri pariwisata secara alami adalah membangun keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Potensi wisata sumber daya alamnya. Dan pada dasarnya pemerintah daerah Melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Tangkahan untuk Dikembangkan Pariwisata juga merupakan pembangunan lintas sektoral.

Tabel. 2.Peran Pemerintah sebagai fasilitator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Klasifikasi Peran | Bentuk Program |
| 1 | Penyusunan Rencana | * Sebagai pelaksana Kongres Lembaga Pariwisata Tangkahan * Sebagai prioritas pengembangan pariwisata tangkahan |
| 2 | Penentuan kebijakan | * Pembuat surat keputusan pembentukan Lembaga Pariwisata Tangkahan * Diakuinya pariwisata tangkahan sebagai destinasi pariwisata yang dirintis oleh masyarakat lokal tangkahan |
| 3 | Pembinaan SDM | * Sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat tangkahan * pelatihan peningkatan skill masyarakat * kemitran pemerintahan kabupaten langkat dengan lembaga pariwisata tangkahan |

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2022)*

**Tahap Pelaksanaan *Community Based Tourism* Tangkahan**

Dari penelitian ini bisa dijelaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat berawal berdasarkan keterlibatan rakyat pada mengelola potensi yang masih ada pada tangkahan, pemberdayaan masyarakat dilakukan pada pengelolaan atraksi wisata, contohnya misalnya sebagai pemandu wisata/Ranger, mengelola penginapan, Toko sovenir, rastauran, penyedian penyewaan pondok dan ban tubing. Pengelolaan potensi yang dilakukan masyarakat tangkahan telah di arahkan kepada pengembangan yang berwawasan ekowisata, hai ini menggunakan potensi yang dikembangkan masyarakat Tangkahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam pengembangan pariwisata tangkahan, kurangnya rencana pembangunan kawasan tangkahan dan kurangnya dana membangun lokasi in-out dan kawasaan soevenir. Oleh karena itu, Dukungan dan peran pemerintah dan investor sangat diperlukan untuk melaksanakan Rencana Pengembangan kawasan Tangkahan, dan kerjasama para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan menarik wisatawan ke wisata Tangkahan.

# KESIMPULAN DAN SARAN

**Kesimpulan**

Hasil lapangan dan Dari pembahasan berdasarkan temuan pada “Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam Pengembangan pariwisata Tangkahan” Berdasarkan yang diteliti, Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam pengembangan Pariwisata Tangkahan**

Tangkahan merupakan objek wisata yang masuk dalam kategori ekowisata dan konservasi yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi dalam pengembangan daya tarik wisata yang ada di dalamnya. Konsep Community Based Tourism yang diterapkan untuk mencapai pengembangan pariwisata dan diaplikasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan desa wisata, dan terciptanya kegiatan usaha masyarakat.

1. **Pembentukan Lembaga Pariwisata Tangkahan**

Masyarakat Tangkahan yang sudah mengenal pariwisata membutuhkan wadah untuk menuangkan ide dan gagasan ke dalam mengelola daya tarik wisata. Masyarakat yang tergabung dalam beberapa kelompok masyarakat di tangkahan mendirikan Lembaga Pariwisata Tangkahan yang fokus pada pengelolaan semua atraksi, termasuk perwakilan dari semua kelompok masyarakat terkait. tangkahan tidak bisa bergerak sendiri, dan mereka bermitra dengan Taman Nasional Gunung Lauser, Pemerintaha Desa, Pemerintah kabupaten dan lembaga Suadaya masyarakat nasional maupun Internasional. Dengan melibatkan banyak mitra, Lembaga Pariwisata Tangkahan mendapatkan banyak bimbingan, pengetahuan, dan dukungan untuk memastikan bahwa pengelolaan objek wisata yang baik.

1. **Partisipasi Masyarakat Lokal**

Pengelolaan pariwisata tangkahan pada Desa namo Sialang dan Sei Serdang adalah menurut inisiatif warga lokal yg mempunyai kesadaran bahwa desanya mempunyai potensi wisata yang bisa dikembangkan. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata ada melalui partisipasi warga lokal. Masyarakat atas inisiatif sendiri melakukan kerja sama yg diikuti warga khususnya sekitaran tangkahan. Meraka menyadari pengetahuan mengenai kepariwisataan masih kurang. Pada akhirnya mereka melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata mengikuti pembinaan dan pengenalan mengenai kepariwisatan sebagai bekal dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata.

1. **Peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan pariwisata Tangkahan**

Pengembangan pariwisata Tangkahan di desa Namo sialang dan Sei Serdang dapat berfungsi dengan adanya peran pemerintah baik di tingkat pemerintahan desa maupun pemerintah Kabupaten Langkat sebagai perantara. Peran Pemerintah Kabupaten langkat berupa penyusunan rencana pengembangan desa dengan melakukan perbaikan jalan dan memberikan pelatihan kepada Lembaga terkait perkembangan pariwisata Tangkahan. Peran Pemerintah Desa Namo sialang dan Sei Serdang menajdi penengah dan fasilitator dalam pembentukan dan pelaksanaan program kerja lembaga pariwisata tangkahan.

# Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. **Penerapan Community Based Tourism agar pengembangan dan pengelolaan pariwisata dapat terus berlanjut.**
2. Memperjelas tugas masing-masing pengurus yang tergabung dalam Lembaga Pariwisata Tangkahan dalam bentuk panduan teknis sehingga fungsi kepengurusan dapat berjalan semua sesuai tugasnya masing-masing.
3. Kemitraan yang dibangun oleh Lembaga Pariwisata Tangkahan dengan kelompok masyarakat lainnya seharusnya dapat diperjelas dalam bentuk kesepakatan tertulis untuk menghindari konflik dikemudian hari apabila sudah terdapat pemasukan besar dari aktifitas pariwisata yang ada.
4. Orientasi masyarakat yang selama ini dalam bentuk pengabdian dan gotong royong seharusnya mulai diarahkan ke orientasi bisnis agar mereka mendapatkan nilai manfaat ekonomi yang lebih besar dalam pengelolaan daya tarik wisata yang ada.
5. Mengembangkan dan menyepakati konsep rencana pengelolaan secara tertulis untuk memperjelas tujuan yang dicapai. Implementasi sebenarnya mudah karena mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan bisa mengukur ratingnya**.**

# UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Pariwisata Medan atas bantuan dan dukungannya, sehingga penelitian dengan judul Penerapan *Community Based Tourism* (CBT) Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata di Tangkahan Kabupaten Langkat.

# DAFTAR PUSTAKA

Adikampana, I. M. (2017) *Pariwisata Berbasis Masyarakat.*

Ahsani, R. D. P. *et al.* (2018) ‘Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa’, *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2). doi: 10.26905/pjiap.v3i2.2270.

Febriandhika, I. and Kurniawan, T. (2019) ‘Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community-Based Tourism : Sebuah Review Literatur’, *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), p. 50. doi: 10.26740/jpsi.v3n2.p50-56

Hermawati, P. R. (2020) ‘Komponen Kepariwisataan dan Pengembangan Community Based Tourism Di Desa Wisata Nglanggeran’, *Pariwisata*, 7(1), pp. 31–43.

Imani, R., Arman, U. D. and Sari, A. (2021) ‘The community capacity to respond to earthquakes and tsunami threat in Air Tawar Barat Sub-District, Padang City, West Sumatra, Indonesia’, in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, p. 012005. doi: 10.1088/1755-1315/708/1/012005.

Isdarmanto (2016) *Dasar Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, *Perpus.Univpancasila.Ac.Id*. Available at: http://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EBUPT190173.pdf.

Joanna Ochocka, Community Based Research, disampaikan dalam Advanced CBR Training yang diselenggarakan oleh SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Singgasana Surabaya, 25-29 Agustus 2014.

Lubis, H. S., Pascasarjana, P. and Utara, U. S. (2007) ‘Perencanaan pengembangan ekowisata berbasis komunitas di kawasan wisata tengkahan kabupaten langkat sumatera utara’, pp. 2006–2008.

N, F. A., Krisnani, H. and Darwis, R. S. (2015) ‘Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism’, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), pp. 341–346. doi: 10.24198/jppm.v2i3.13581.

Masriana (2019) ‘Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyrakat (Community Based Tourism) Di Pantai Ide Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur’, *Universitas Muhammadiyah Makassar*, pp. 1–125. Available at: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7232-Full\_Text.pdf.

Nurhidayati, S. E. and Fandeli, C. (2012) ‘Penerapan Prinsip Community Based Tourism ( CBT ) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu , Jawa Timur’, *Jejaring Administrasi Publik*, IV(1), pp. 36–46.

Purbasari, N. dan A. (2014) ‘Keberhasilan Community Based Tourism di Desa Wisata di Desa Wisata Kembangarum, Pentingsari dan Nglanggeran Kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia , tak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta . Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pem’, *Jurnal Teknik PWK*, 3(3), pp. 476–485.

Prakoso, A. A. and Pravita, V. D. (2018) ‘Model Pengembangan Pariwisata berbasis Komunitas pada Desa Nelayan di Daerah Istimewa Yogyakarta’, *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2018 : Membangun Green Entrepreneur Solusi Bonus Demografi Indonesia*, pp. 129–137.

Rizkianto, N. (2017) ‘Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Daya’.

Suansri, P. 2003. Comunity Based Tourism Handbook. Bangkok, Thailand: Responsible Ecological Social Tours (REST) Project.

Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. 2013. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugi Rahayu, M. P. *et al.* (2015) ‘Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta’, (APRIL). Available at: http://eprints.uny.ac.id/36336/%5Cnhttp://eprints.uny.ac.id/36336/1/Sugi Rahayu\_HB\_2015.pdf%5Cnhttp://eprints.uny.ac.id/36336/%5Cnhttp://eprints.uny.ac.id/36336/1/Sugi Rahayu\_HB\_2015.pdf.